

**PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG  
PERSYARATAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**AYU CHASANA**

**NPM: 1621010008**

**Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag.**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

## **ABSTRAK**

### **PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG PERSYARATAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN**

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya saksi di antara persyaratan saksi adalah harus adil dan harus kelamin laki-laki. Saksi yang dimaksud sesuai dengan hadis Nabi SAW adalah saksi yang bersifat adil, yaitu yang menunaikan yang fardu dan sunnah, menjauhi yang haram dan dimakruhkan, serta tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil serta menghiasi diri dengan kebaikan, meninggalkan apa yang menjelekan dirinya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan saksi ada yang berpendapat saksi harus adil dan berjenis kelamin laki-laki menurut pendapat Imam Syafi'i, dan ada pula yang tidak mensyaratkan demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Dari persoalan tersebut penulis menyimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan dan bagaimana istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan dan istinbath hukum saksi dalam pernikahan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder dan data tersier. Data skunder diperoleh dari buku-buku karya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan kitab-kitab Imam mazhab, jurnal, literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersier adalah data pendukung lain yang membahas tentang persyaratan saksi dalam pernikahan. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif yaitu membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Hasil Penelitian ini menyimpulkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan, Terkait dengan kriteria adil dan jenis kelamin saksi, keduanya berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah pernikahan dengan dua orang saksi fasik. sah pernikahan dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Adapun Imam Syafi'i berpendapat persyaratan saksi dalam pernikahan adalah dua orang laki-laki yang adil dari keduanya. Metode pengambilan istinbath hukum yang dilakukan Imam Abu Hanifah berdasarkan Al Qur'an dan qiyas. Istinbath hukum yang di ambil Imam Syafi'i berdasarkan hadis riwayat Aisyah ra. Dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i harus menggunakan saksi. Dengan adanya saksi untuk menolak keraguan dan tuduhan dari pernikahan. Melalui kesaksian akan menjadi nyata kepercayaan dan kehati-hatian dalam menetapkan perkawinan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU CHASANAH  
Npm : 1621010008  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,  
Penulis,

Ayu Chasanah  
NPM: 1621010008





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp 0721 780887*

**PERSETUJUAN**

Judul : **Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang  
Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan.**

Nama : **Ayu Chasanah**

Npm : **1621010008**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Fakultas : **Syariah**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP:195512251985031002**

  
**Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP:197012282000031002**

Ketua Jurusan

  
**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
**NIP: 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Sekripsi ini berjudul “**PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I TENTANG PERSYARATAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN**” disusun oleh **Ayu Chasanah, NPM: 1621010008**, program studi **Ahwal Syakhsiyyah** telah diujikan dalam **Sidang Munaqosyah** di **Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung** pada **Hari/Tanggal: Rabu, 22 Juli 2020**.

**Tim Penguji**

**Ketua : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

  
(.....)

**Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

  
(.....)

**Penguji I : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

  
(.....)

**Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

  
(.....)

**Penguji III : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

  
(.....)



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syari’ah**

  
**Dr. KH. Khoiruddin, M.H.**  
**NIP. 19210221993031002**

## MOTTO

.....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

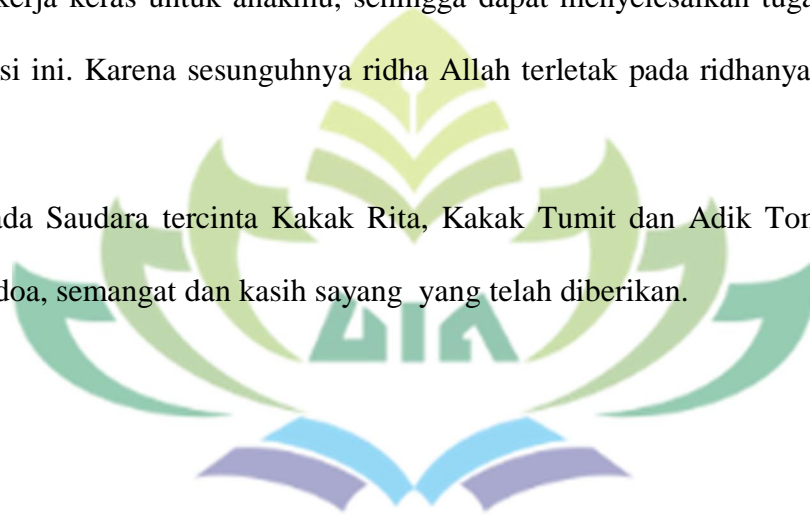
Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.” (QS.Al-Baqarah (2): 282)



## **PERSEMBAHAN**

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua tercinta ayah dan ibu Sutimin dan Murtijah, trimakasih atas doa, motivasi dan bimbingan sampai detik ini, trimakasih atas kasih sayang dan kerja keras untuk anakmu, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah skripsi ini. Karena sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridhanya kedua orang tua.
2. Kepada Saudara tercinta Kakak Rita, Kakak Tumit dan Adik Tomi trimakasih atas doa, semangat dan kasih sayang yang telah diberikan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Ayu Chasanah, Penulis dilahirkan di Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji pada tanggal 17 Agustus 1997. Penulis merupakan anak ketiga (3) dari empat (4) ,dari pasangan bapak Sutimin dan ibu Murtijah. Kakak pertama penulis bernama Rita Ningsih, kakak kedua (2) penulis bernama Tumit Wibowo dan adik penulis bernama M. Tomi Wijaya. Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Darma Wanita, yang dimulai pada tahun 2002 dan diselesaikan pada tahun 2004.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, yang dimulai pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Way Serdang Kabupaten Mesuji, dimulai pada tahun 2010 dan di selesaikan pada tahun 2013.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) MAN 2 Bandar Lampung, yang dimulai pada tahun 2013 dan diselesaikan pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I TENTANG PERSYARAT SAKSI DALAM PERNIKAHAN”. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tak lupa mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. yang senangtiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Ahwa lAsy-Syahsiyyah UIN Raden Intan Lampung, dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A Selaku Skertaris Jurusan Ahwal Asy-Syahsiyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.dan Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat kelas Ahwal Asy-Syahsiyyah UIN RadenIntan Lampung Angkatan 2016.
7. Sahabat Gerakan Keluarga Sakinah Indah Septiani, Yuli Asriyani, Alan Puspita Sari, Khikmatul Laila, Fita Ariska Fitriani, Siti Robikatun, dan Olga Riska Pratiwi.
8. Kepada Winarso, S.E. yang selalu memberikan semangat, bantuan dan dukungan tiada henti.
9. Teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Sri Menganten Kabupaten Tanggamus Ajo Ria, WoMeti, CiciHarum, Dwi, Manan, Enggar, Reanita, Nando, Utami, Vebi, Fuad, dan Maul.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu oleh penulis namun telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dari hati saya yang paling dalam saya ucapkan ribuan trimakasih dan tidak lupa penulis slalu panjatkan do'a kehadirat Allah Swt, semoga amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah Swt, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat masalah walbarakah bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lmpung, 14 Januari 2020

Ayu Chasanah

NPM: 1621010008

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan.....	11
G. Signifikasi Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian.....	11

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Pernikahan .....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	21
3. Hukum Pernikahan .....	23
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	25
5. Tujuan Pernikahan.....	36
6. Hikmah Pernikahan .....	37
B. Saksi .....	39
1. Definisi Saksi.....	39
2. Dasar Hukum Saksi .....	40
3. Fungsi dan Hikmah Saksi .....	42
4. Syarat kesaksian .....	43
C. Istimbath .....	47
D. Tinjauan Pustaka .....	50

### BAB III PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG PERSYARATAN SAKSI PERNIKAHAN

A. Imam Abu Hanifah.....	
1. Biografi Imam Abu Hanifah.....	52
2. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Persyaratan Saksi Dalam	

Pernikahan .....	56
3. Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan.....	58
<b>B. Imam Syafi'i .....</b>	<b>60</b>
1. Biografi Imam Syafi'I .....	60
2. Pendapat Imam Syafi'I Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan .....	65
3. Istimbath Hukum Imam Syafi'I Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan.....	68
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Pendapat Imam Syafi'I Dan Imam Hanafi Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan.....	69
B. Istimbath Hukum Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Saksi Pernikahan .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi .....	76

#### Daftar Pustaka





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Judul penelitian yang dibahas adalah “Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Persyaratan Saksi dalam Pernikahan”. Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah (Irak) pada tahun 80 H (659 M). Namanya sejak kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Maah. Ayahnya adalah keturunan dari bangsa Persi yang sudah menetap di Kuffah. Menurut riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena karena ia selalu berteman dengan “tinta” (*dawat*), dan kata Hanifah menurut bahasa Arab berarti “tinta”.<sup>1</sup>

##### **2. Imam Syafi’i**

Muhammad bin Idris al-Abbas bin Usman bin Syafi’i bin as-Sa’ib bin Ubaid Abd Yazid Hasyim bin al-Muththalib bin Abdul Manaf bin Kitab bin

---

<sup>1</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 95-96

Murrah bin Ka'ab Lu'ay bin Ghalib, gelarnya Abu Abdillah. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi).<sup>2</sup> Imam Syafi'i dilahirkan di kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang letaknya di dekat pantai Lautan Putih (Laut Mati) sebelah tengah Palestina (Syam). Ijtihad dan buah pengkajian beliau tentang soal-soal hukum keagamaan diakui dan diikuti kebenarannya oleh sebagian besar kaum Muslimin pada masa itu dikenal dengan sebutan Mazhab Imam Syafi'i. Sebabnya beliau lalu disebut dengan "Syafi'i".

### 3. Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.<sup>3</sup> Kesaksian (*syahaadah*) itu diambil dari kata *musyaahahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan seseorang dengan apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu* atau *syahidtu*).<sup>4</sup>

### 4. Pernikahan

Berasal dari kata nikah yaitu ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan berarti hal (perbuatan) bernikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan

---

<sup>2</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 149

<sup>3</sup> Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan,dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1246

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 55

adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penelitian tentang bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan dan hal-hal yang berkaitan denganya, seperti kriteria saksi dan jenis kelamin saksi.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman masyarakat tentang syarat saksi dalam pernikahan, sehingga tidak diperhatikan syarat dalam memilih saksi dalam pernikahan, padahal saksi merupakan rukun dan syarat sah nikah.

### **2. Alasan Subjektif**

Aspek pembahasan judul ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di bangku kuliah khususnya jurusan Ahwal Al Syaakhshiyah (AS) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan dan literatur yang diperlukan tersedia di ruang perpustakaan serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

## **C. Latar Belakang**

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar Dasar Perkawinan Pasal 2

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Nikah adalah salah satu alasan pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>8</sup> Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menjalankan pertolongan antara satu dengan lainnya.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), h. 374.



Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>9</sup> Seperti dalam firman Allah Swt.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S ar-Ruum 30:21)<sup>10</sup>

Dalam ayat ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt, yaitu kehidupan bersama laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing manusia, menjadikan yang satu tertarik pada yang lain. Sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan dan kecendrungan-kecendrungan antara laki-laki dan perempuan tercapai.

<sup>9</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grarika, 2013), h. 55

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h. 234

Puncak dari semua itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dengan keadaan yang demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik. Sedangkan perempuan hanya suaminya yang menarik hatinya. Masing-masing mereka tentram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semua itu modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang. Kehidupan dan penghidupan menjadi mantap. Kegairahan hidup akan timbul dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Prinsip dari disyariatkannya pernikahan adalah perjumpaan kalbu yang tulus antara laki-laki dan perempuan demi pemeliharaan kesucian dan kehormatan diri. Islam sangat memperhatikan nilai tatkala Rasulullah Saw menegaskan untuk menghormati keinginan wanita (dalam memelihara orang yang dicintai)<sup>11</sup>.

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat mata kepala, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala

---

<sup>11</sup>Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 103.

kewajiban dan hak-hak perkawinan. Syarat-syaratnya ada dua. *Pertama*, perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukanlah merupakan orang-orang yang haram dikawini, baik karena haram untuk sementara atau selama-lamanya. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri para saksi. Ini meliputi masalah-masalah sebagai berikut: hukum mempersaksikan (menghadirkan para saksi), syarat-syarat menjadi saksi, perempuan menjadi saksi.<sup>12</sup>

Syarat menjadi saksi: berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang beraqad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab qabul perkawinan.<sup>13</sup>

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat bahwa KHI sebagai pedoman dalam hukum perkawinan di Indonesia bagi umat Islam. Pasal 24 KHI mengatur bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, kemudian KHI pasal 25 mengatur tentang syarat menjadi saksi yaitu seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dalam KHI pasal 64 mengatur bahwa suatu akad pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka pernikahan tersebut dapat dicegah oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa pernikahan itu harus sesuai rukun dan syaratnya, jika tidak maka seharusnya pernikahan itu dicegah agar tidak melanggar aturan. Namun banyak dari masyarakat bahkan

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 87.

<sup>13</sup>Bilamana para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengar suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut suaranya kedua orang yang beraqad.

pejabat yang berwenang mengabaikan ketentuan itu dengan berbagai permasalahan yang telah tertulis di atas.<sup>14</sup>

Salah satu hal menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah adilnya saksi, saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala hal karena saksi dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan menjadi keterangan mengenai terjadinya pernikahan yang dilihatnya apabila alat bukti yang lain dirasa kurang.

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa tersebut, maka saksi akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang ia lihat dan dengar. Hikmat disyariatkannya saksi dalam sebuah pernikahan adalah seorang saksi dapat menolak tuduhan dan keraguan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

  
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : “Dan tegakkan kesaksian itu karena Allah” (QS. Ath Thalaq 65:2)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ  
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ " <sup>١٥</sup>

“Dari Aisyah ra, Rosulullah Saw bersabda: Tidak ada nikah kecuali, dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Daraquthni)

---

<sup>14</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 41

<sup>15</sup> Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali al Baihaqi, *Sunah Al-Kubro Juz 7*, (Libanon: Darul Khotob Al-ilmiyah, 2003), h. 202



Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kesaksian dalam suatu akad pernikahan itu berperan penting yang mempengaruhi sahnya suatu pernikahan. Namun dalam kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia dewasa ini bahwa kesaksian itu hanya dianggap formalitas suatu akad pernikahan, bahkan menjadi saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang esensial. Banyak di antara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seseorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menunjuk saksi dari orang-orang yang bisa dikatakan fasik, seperti hampir tidak pernah melaksanakan shalat fardu, shalat jum'at, masuk bulan Ramadhan pun mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Dan lebih memprihatinkan ada sebagian masyarakat yang memilih saksi untuk pernikahan yakni orang-orang yang suka melakukan kemungkaran, seperti mabuk-mabukan dan berjudi.<sup>16</sup>

Sehingga peran saksi dipilih dari orang tua atau keluarga tadi hanya sebatas formalitas atau bahkan pelengkap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya peran seorang saksi dalam masalah ini tidak dianggap hal yang penting dan dapat berpengaruh pada keabsahan akad perkawinan tersebut.

---

<sup>16</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Hidakar, 1991), h. 56

Ketentuan saksi di dalam pernikahan harus dua orang (HR. Daraquthni) dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi secara komulatif yaitu:<sup>17</sup> baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil, mendengar dan melihat (tidak bisu), mengerti maksud ijab-qabul, kuat ingatan, berahlak baik, tidak sedang menjadi wali. Di antara ulama terjadi perbedaan pendapat terhadap kriteria saksi dan jenis kelaminnya, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang ini, peneliti merasa perlu meneliti lebih lanjut permasalahan saksi dalam akad pernikahan yang sesuai dengan judul penelitian, **“Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan”**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Mengkaji permasalahan saksi dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah sangat luas bahasannya. Karena itu peneliti memfokuskan pada Istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan. Di samping dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji perlu penamatan yang mendalam supaya data yang diambil dari peneliti bersifat absah dan jelas karena dilakukan langsung oleh peneliti melalui data-data kepustakaan.

#### **E. Rumusan Masalah**

---

<sup>17</sup>Saifuddin Arief, *Notaris Syariah dalam Praktek Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), h.52

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan?
2. Bagaimana istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan?

#### **F. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persyaratan saksi dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi penyebaran ilmu maupun sebagai sumber informasi, yang serta metodologis:

1. Bagi penyebaran teoritis, memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai persyaratan saksi dalam pernikahan. Memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum Islam.
2. Bagi kegunaan praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk memahami mengenai syarat saksi dalam pernikahan.

#### **H. Metode Penelitian**

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik disebut dengan penelitian normative dalam hukum Islam, disebut normatif karena penelitian hukum doktriner, juga di sebut sebagai penelitian pustaka atau studi dokumen. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada diperpustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitik.<sup>19</sup> Yaitu penelitian memaparkan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang persyaratan saksi dalam pernikahan.

2. Jenis dan sumber data

---

<sup>18</sup>Bamabang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 114-117.

<sup>19</sup>Cholid Narbuko Dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 45



Dalam penelitian *library research* penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif.<sup>20</sup> Dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data sekunder dan data tersier. Data sekunder ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, adalah merupakan sumber data<sup>21</sup> atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yakni kitab, buku atau literatur asli dalam hal ini adalah kitab karangan Imam Abu Hanifah dan kitab Imam Syafi'i, dan ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu sebagai hasil penelitian, tinjauan para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>22</sup>

### 3. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>23</sup> Pengolahan data dilakukan dengan cara:

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 75.

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 121.

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199

- a. Klasifikasi Data: mereduksi data yang ada <sup>dengan</sup> cara menyusun dan mengkasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- b. Ferifikasi Data: mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.
- c. Sistematisasi Data: sistematisasi yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup> Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkn kesimpulan khusus. Prosedur pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode komparatif atau perbandingan yaitu penelitian yang menggunakan teknik membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaanya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 29

<sup>25</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 25

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapun yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>26</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.<sup>27</sup> Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>28</sup>

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “barangsiapa yang kawin berarti ia melaksanakan separo (ajaran) agamanya, yang separo lagi, hendak ia takwa kepada Allah” demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

---

<sup>26</sup>Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.

<sup>27</sup>Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2 -2016.

<sup>28</sup>Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

Bahwa agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *illat* atau alasanya) untuk kawin dapat dibaca dalam al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Tujuanya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.<sup>29</sup>

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.<sup>31</sup>

Nikah berarti pengabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>32</sup> Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah dalam ungkapan bahasa adalah *wath'i* (bersetubuh). Sehingga makna nikah secara hakiki adalah (الضم) berkumpul.<sup>33</sup> Demikian itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla berikut ini:

---

<sup>29</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 3.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Perdana Media Grup, 2003), h. 8.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 10.

<sup>32</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 3.

<sup>33</sup> Umi Hani, Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* Vol.6 1 Januari 2019

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ  
 بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٌ  
 غَيْرُ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ  
 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ  
 مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam dan Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraanya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka, (yang tidak bersuami). Kebolehan menikahi hamba sahaya itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS an-Nisa 4:25)

(QS Al-Baqarah (2):230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ  
وَتِلْكَ وَرَبْعٌ فَانْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(QS. an-Nisa 4:5)

Dalam ayat sebelum ayat-ayat ini, Allah SWT dalam firman-Nya memerintahkan orang yang menyerahkan kepada anak-anak yatim harta mereka jika mereka sudah mencapai dewasa (baligh) dan melarang orang memakan harta anak yatim atau mencampurbaurkannya dengan hartanya sendiri. Allah berfirman janganlah kamu menukar yang buruk, yaitu memakan harta halalmu sendiri. Perbuatan yang demikian itu merupakan dosa yang besar.

Dan ayat ini menjelaskan, Allah berfirman bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim perempuan yang berada dibawah perwalianmu yang kamu ingin mengawininya, maka carilah wanita lain untuk

menjadi istrimu, dua, tiga, atau empat sesuka hatimu. Namun jika terdapat istri-istri yang lebih dari satu itu, kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam perlakuan terhadap mereka mengenai pelayanan, pakaian, tempat, giliran bermalam dan lain-lain, maka hendklah kamu beristrikan satu orang saja atau cukup dengan budak-budak yang kamu miliki.<sup>34</sup>

Di bawah ini diturunkan beberapa hadis Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa seorang muslim boleh berisikan lebih dari satu orang sampai empat tidak lebih. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Ibnu Syihab bahwa Gailan bin Salamah Atstsaqafi beristrikan sepuluh orang tatkala ia masuk Islam. Oleh Rasulullah ia disuruh memilih empat dari sepuluh istri itu. Dan dimasa khilafah Sayidina Umar, Ghailan menceraikan semua istrinya dan membagi-bagikan harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Mendengar perbuatan Ghailan itu, Umar segera memanggilnya dan mengatakan kepadanya. “Aku kira engkau telah dibisiki oleh setan bahwa engkau akan segera mati dan tidak akan tinggal lebih lama hidup, sehingga engkau terburu-buru menceraikan istri-istrimu dan membagi-bagikan harta kekayaanmu kepada anak-anakmu saja. Demi Allah jika engkau tidak mengembalikan istri-istrimu dan mengembalikan hartamu kekayaanmu, aku akan mewariskan hartamu kepada mereka dan akan memerintahkan kuburmu dirajam seperti kubur Abi Rughai.

---

<sup>34</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2* (Surabaya:Bina Ilmu, 2005), h. 310

Menurut Al Baihaqi bahwa dengan hadis Ghailan itu Rasulullah jelas-jelas melarang orang mempunyai istri lebih dari empat. Kalau tidak, pasti Rasulullah tidak akan menyuruh Ghailan menceraikan keenam istrinya yang sudah dinikahinya sebelum ia masuk Islam dan juga bersama-sama dia masuk Islam.<sup>35</sup>

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>36</sup> Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>37</sup>

Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh". Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan oleh manusia karena

---

<sup>35</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al-Isrotul Muslimah (Fikih Keluarga)* Terjemah Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004) h. 126

<sup>36</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Ahli Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

<sup>37</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 5.

mengandung keabsahan hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan kepada perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Selain itu nikah juga dapat diartikan sebagai bersetubuh.<sup>38</sup>

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>39</sup> Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Dasar hukum pernikahan antara lain yaitu:

### a. Al-Qur'an

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (QS Al-Dzariyat 51:49)

---

<sup>38</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

<sup>39</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.8

<sup>40</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 21

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. an-Nisa 4:7)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ  
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ  
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ  
 مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada

Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. an-Nur 24:31)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum ayat 21)

b. Hadis

مع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ  
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواهوه صحيح البخاري)  
“Nabi SAW bersabda “ Barang siapa yang mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin. Karena (nikah) itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab puasa itu akan menjadi benteng baginya.” (HR. Shahih Bukhari )<sup>41</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Perkawinan merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>41</sup>Imam Abdul Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari* Jilid VII (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), h. 6



- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (umat), afdal (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemulyaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b. Maslahat yang disunnahkan oleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan sampai mendekati maslahat yang mubah.
- c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terdapat dari nilai kandungan maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: “maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.”<sup>42</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat

---

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terjemah Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 558-559.

larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatnya. Keharaman dalam berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun kedua-duanya merupakan perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu merupakan mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencapuri istri.
3. Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

4. Nikah Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

#### **4. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;

## 5. Shigat ijab qabul.<sup>43</sup>

Ijab artinya menawarkan dan qabul artinya menerima. Menurut hukum perkawinan Islam, Ijab berarti penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Dikatakan oleh pihak perempuan kepada calon pengantin laki-laki (suami). Qabul artinya pernyataan penegasan penerimaan mengikat diri sebagai suami

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:<sup>44</sup>

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon istri
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- g. Tidak sedang berihram haji atau umrah
- h. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h, 68

<sup>44</sup> S. Munir, *fiqh syari'ah*, (Solo: Amanda, 2007), h. 34

<sup>45</sup> *Ibid*, h.34

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus ada kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan pekawinan.

Wahbah az-Zuhaili sangat menekankan perlunya pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau ahli kesehatan untuk menyakinkan keduanya kesehatan untuk melangsungkan perkawinan. Dewasa ini yang paling penting dilakukan untuk mengantisipasi berbagai penyakit menular atau penyakit yang bisabmengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>46</sup> Umpamanya penyakit kelamin atau penyakit yang lebih parah lagi, yakni terserang oleh virus yang menurunkan kekebalan tubuh seperti HIV AIDS yang mematikan.<sup>47</sup> Hal ini bukan untuk mengucilkan salah satu pihak, tetapi untuk kemaslahatan mereka juga untuk mendapatkan keturunan yang sehat lahir batin, sebagai firman Allah:

---

<sup>46</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 189

<sup>47</sup> HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) sebagai penyebab seseorang menderita penyakit AIDS, AIDS (*Aquired Immunodeficiency Syndrome*).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa 4:4)

Keberadaan wali dalam perkawinan menurut hadis Rasulullah mutlak diperlukan. Menurut mazhab Syafi’i, izin wali termasuk rukun perkawinan, demikian pula mazhab Maliki dan Hambali. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya. Ini merupakan penjelasan dari firman Allah Swt:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah 2:232).

Ayat diatas memerintahkan kepada wali untuk tidak melarang seorang istri yang ditalak *raj’i* oleh suaminya untuk kembali kepada suaminya itu.



Imam Syafi'i memahami bahwa ayat ini ditunjukkan kepada wali sesuai dengan bunyi hadis yang melarang nikah tanpa wali.

Syarat-syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan suatu akad nikah):<sup>48</sup>

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak dalam keadaan ihrom, untuk haji atau umrah

Syarat-syarat saksi adalah:<sup>49</sup>

- a. Dua orang laki-laki;
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Adil
- f. Dapat melihat dan mendengar
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

Nas Al-Qur'an dalam QS. At-Thalaq (65): 2; menyintir masalah saksi dalam pernikahan. Dapat dipahami bahwa saksi dalam pernikahan merupakan

---

<sup>48</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 43

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 83

suatu keharusan yang menyebabkan sah tidaknya akad nikah. Meskipun demikian;<sup>50</sup>

Syarat-syarat Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *shigat* hendaknya menggunakan ucapan yang waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukan waktu yang akan datang.

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: “kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak “kemudian dijawab: “saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

*Shigat* itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “ya saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

---

<sup>50</sup> Khoirul Abror, Wali dan Saksi Pernikahan (Perspektif Yuridis, Psikologis dan Sosiologi), *Jurnal Al-Adalah* Fakultas Syari'ah UIN Intan Lampung, 2019, h. 15

Menurut pendapat Mohammad Daud Ali ada beberapa yang harus diperhatikan. Hal-hal itu adalah syarat dan rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah (1) persetujuan para pihak, menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami istri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan ijab (penawaran tanggung jawab), diisyaratkan izin dan persetujuannya sebelum perkawinan dilaksanakan. Adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksakan kemauanya yang punya diri (wanita calon pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak sekali para gadis yang merana karena kawin paksa. Para pemaksa biasanya berlindung dibalik perisai fatwa-fatwa yang membolehkan sang ayah atau kakek sebagai wali mujbir memaksa seorang gadis untuk kawin dengan laki-laki yang tidak disukainya. Kadang malah sangat dibencinya pula. Oleh karena itu pada hakikatnya pemaksaan ini adalah penzaliman yang mungkin tidak sengaja dilakukan oleh orang-orang tua terhadap anak-anaknya. Sesungguhnya pemaksaan itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam. “Janganlah nikahkan anak gadis sebelum diminta izinnya”, demikian sabda Nabi Muhammad. Izin yang dimaksud oleh nabi itu adalah persetujuan sungguh-sungguh, bukan izin proforma (pura-pura) belaka.

Dalam hubungan ini, agaknya, tidak ada salahnya kalau dikemukakan bahwa tatkala Nabi Muhammad masih hidup, beliau pernah melarang seorang wanita sebelum wali itu memperoleh izin wanita yang bersangkutan. Dalam

kasus perkawinan yang sudah “terlanjur” dilaksanakan tanpa izin yang punya diri, pernah Nabi menyuruh wanita yang tidak diminta izinnya itu memilih meneruskan perkawinannya itu atau membatalkannya. Berita tersebut dalam kalimat terakhir ini cukup membuktikan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan para pihak, terutama pihak wanita. Ini berarti bahwa kedua mempelai harus setuju untuk kawin. Persetujuan itu harus dinyatakan dalam keadaan pikiran sehat, norma, tanpa paksaan. Kalau calon suami atau calon istri tidak memberikan persetujuannya, mereka tidak dapat dinikahkan. Dulu, memang ada pendapat yang menyatakan bahwa persetujuan wanita cukup dilihat dari diamnya saja, tetapi kini, persetujuannya itu harus jelas dinyatakan, sekurang-kurangnya dengan isyarat atau tertulis (kalau ia pandai menulis). Akan tetapi, pernyataan lisan tentang persetujuan itu seharusnya benar-benar dinyatakan oleh yang bersangkutan.

Akad Nikah. Akad nikah berasal dari kata-kata ‘aqdu al nikah yang terdapat pada al-Qur’an. Akad artinya ikatan (perjanjian yang kuat) dan nikah artinya perkawinan. Dengan demikian, akad nikah artinya perjanjian mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria. Menurut hukum Islam sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada dilaksanakan rukun nikah sebaik-baiknya. Kalau rukun nikah tidak dipenuhi, perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya.

Yang lain yang harus diperhatikan adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus bersandarkan pada:

- a. Pergaulan yang ma'ruf (pergaulan yang baik). Dalam Al-Qur'an (surat 4:19 dan 34, serta surat 30:21)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artiya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat diatas menjelaskan petunjuk dalam pergaulan hidup yang baik antara suami istri, ditentukan asas-asanya, yaitu (1) harus didasarkan pada rasa tegang-menegang, rasa-merasa, saling menjaga rahasia (pribadi) masing-masing; (2) harus memelihara *sakinah* yakni ketantraman hidup dalam rumah tangga; (3) saling merawt cinta (*mawadah*) terutama dimasa muda; (4) saling membina kasih sayang (*rahmah*), santun-menyantuni terutama diwaktu tua; (5) saling memenuhi kewajiban.

b. Penegasan kedudukan. Menurut hukum Islam, laki-lakilah yang menjadi kepala keluarga. Penegasan kedudukan ini dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa:34



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ  
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa suami adalah kepala kepala keluarga (menjadi penangung jawab kehidupan keluarga) karena kelebihan tubuh dan kestabilan jiwa yang diberikan Tuhan kepadanya. Disamping itu, karena suami berkewajiban membiayai hidup dan kehidupan keluarga. Seorang istri adalah kepala rumah tangga, menjadi pendidik anak-anaknya, terutama diusia muda. Penggunaan kedudukan masing-masing harus saling isi-mengisi secara seimbang dan harmonis.

- c. Kedua suami istri harus bertempat tinggal pada tempat yang sama. Suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Dalam al-Qur'an surat at-Talaq:3

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ

أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

d. Tanggung jawab memberi nafkah. Pemberian nafkah menjadi tanggung

jawab suami, tetapi istri dapat membantu mencari rezeki membiayai

kehidupan keluarga. Al-Qur'an surat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya:”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Termasuk dalam biaya hidup dan kehidupan keluarga adalah belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, biaya pemeliharaan dan perawatan anak-anak, dan biaya sekolah dan pendidikan keluarga (anak-anak terutama).

- e. Tangung jawab kerumah tangga. Istri mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab mengenai pengeluaran belanja. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa:34 menyatakan bahwa “istri yang baik adalah istri yang tunduk pada perintah Allah, menjaga rumah tangganya serta memelihara rahasia suami dan keluarganya”. Rasulullah menegaskan dalam sunnahnya bahwa “istri adalah penanggung jawab dalam rumah tangga” karena itu wajib mengatur urusan rumah tangga.<sup>51</sup>

## **5. Tujuan Pernikahan**

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid* h. 17

<sup>52</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2003), h. 22

Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan menjadi lima yaitu:<sup>53</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntunan naluri hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

## **6. Hikmah Pernikahan**

Hikmah pernikahan menurut M. Idris Ramulyo yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab pada keluarga, masyarakat dan Negara. Perkawinan membutuhkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>54</sup> Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia hidup berpasang-pasang. hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk

---

<sup>53</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 12-13

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

itu haruslah diadakan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau *ijab qabul* perkawinan.<sup>55</sup>

Islam mengejarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan adalah:

Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan yang tenang menikmati barang yang berharga.

Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang, ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan

---

<sup>55</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 31

memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekurangan, memperteguh kelangengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

## **B. Saksi**

### **1. Definisi Saksi**

Kesaksian (*syahaadah*) itu diambil dari kata *musyahadah*. Yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu* atau *syahidtu*).<sup>56</sup>

Dikatakan pula bahwa kesaksian (*syahadah*) berasal dari kata *i'laam* (pemberitahuan). Firman Allah Ta'aala:

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14* (Bandung: Ma'arif Bandung, 1996), h. 55



شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

Artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS Ali Imran ayat 18)

Di sini arti dari kata syahida adalah alima (mengetahui). Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.

## 2. Dasar Hukum Kesaksian

Kesaksian itu fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karna firman Allah Ta’aala:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (QS ath-Thalaq ayat 2)

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik dibadanya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, karena firman Allah Ta’aala:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ<sup>ج</sup>  
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup>  
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى<sup>ط</sup>  
 أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ<sup>ط</sup>  
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup>  
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ<sup>ط</sup>  
 بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS Al-Baqarah ayat 282)

Di dalam hadis shahih:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ،، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟  
هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ،، رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>57</sup>

Artinya: Dari Zaid bin Khalid Al-Juhany bahwa Nabi Saw, bersabda, “maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian?” yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya”. (HR. Muslim)

Apabila saksi itu banyak dan tidak dikhawatirkan kebenaran akan disiasikan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah; sehingga bila seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka dia tidak berdosa. Apabila persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah atas persaksian itu kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan itu. Akan tetapi bila kesaksian itu tidak ditentukan, maka saksi boleh mengambil upah atas kesaksiannya.

### 3. Fungsi dan Hikmah Saksi

Ada beberapa fungsi saksi menurut Tihami dan Sohari Sahrani sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Membantu hakim dalam menundukan dan memutuskan perkara
2. Mendorong terwujudnya sifat jujur
3. Untuk menegakan keadilan
4. Saksi sebagai salah satu alat bukti

---

<sup>57</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 667

<sup>58</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 115-121

Hikmah disyariatkannya saksi dalam pernikahan itu untuk menjelaskan penting dan urgennya saksi dalam pernikahan, jelasnya keberadaan saksi diantara manusia untuk menolak keraguan dan tuduhan dari pernikahan itu sendiri. Di samping kesaksian dalam perkawinan itu untuk membedakan antara yang halal dan haram, keadaan halal itu jelas, dan keadaan itu tertutup biasanya. Melalui kesaksian, akan menjadi nyata kepercayaan terhadap urusan perkawinan dan kehati-hatian dalam menetapkan perkawinan tatkala dibutuhkan.<sup>59</sup>

#### 4. Syarat Kesaksian

Disyaratkan atas kesaksian itu sebagai berikut

- a. Islam: Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat ditengah perjalanan. Yang demikian itu diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih dan Ibrahim An-Nakha'i. Ini adalah pendapat Al-Auza'i, berdasarkan firman Allah Ta'aala:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  
فَأَصْبَحْتُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ

---

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhairy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Syiria: Dar al-Fikr,2002), h. 6561

إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا

إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (surat Al-Maidah ayat 106)

فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَاخْرَاجِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ  
الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَیْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْتُنَا أَحَقُّ مِنْ  
شَهِدَتِيهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “ Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang yang Menganiaya diri sendiri”.(surat Al-Maidah ayat 107)

Demikian pula orang-orang Hanifahyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya, sebab Nabi saw. merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa

keduanya telah berbuat zina. Dari Asy-Sya'bi: Bahwa seorang lelaki dari kaum muslimin didatangi oleh kematian di Daqauqa, sedang dia tidak mendapatkan seorangpun dari kaum muslimin yang menjadi saksi untuk wasiatnya. Lalu dia mengagkat dua orang lelaki dari ahli Kitab untuk menjadi saksi. Kemudian kedua orang itu datang ke Kufah, menemui Abu Musa Al-Asy'ari: Ini adalah perkara yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. setelah shalat ashar, dia minta kepada keduanya untuk bersumpah karena Allah bahwa keduanya itu tidak akan berkhianat, tidak akan menyimpan dan tidak akan mengubah wasiat itu; dan bahwa wasiat itu adalah wasiat lelaki tadi. Lalu beliau membolehkan kesaksian keduanya.

- b. Adil: sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka; karena firman Allah Ta'aala:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. (surat Ath-Thalaq ayat 2)



مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: “Dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (QS. Al-Baqarah (2):282)

وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ  
ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ  
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujuraat ayat 6)

- c. Baligh dan Berakal: Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan.

Oleh sebab itu, maka tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia; begitu pula kesaksian orang gila dan orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi. Imam Malik memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiyaan, selagi mereka masih berselisih dan tidak bercerai-berai. yang demikian juga diperbolehkan oleh Abdullah ibnuz Zubair.

Demikian pula perbuatan para sahabat dan fuqaha Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiyaannya sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal ini disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka.

Maka seandainya kesaksian anak-anak dan kesaksian wanita tidak diterima, tentu hak-hak akan hilang, macet dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang kerumah mereka, sedang mereka menyampaikan berita yang sama, mereka dipisahkan sewaktu menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka amat lebih kuat dari dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang laki-laki dewasa. yang demikian itu tidak mungkin ditolak dan diingkari. Kami tidak berprasangka bahwa syari'at yang sempurna, unggul dunia dan akhirat mengabaikan dan menyalahkan hak seperti ini, sedang dalil-dalilnya ada dan kuat, sementara itu menerima dalil yang lain.

- d. Berbicara: Sudah barang tentu seseorang saksi harus dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami; kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang syah dari madzhab Syafi'i
- e. Hafal dan Cermat: Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalan, banyak lupa dan salah; karena dia kehilangan kepercayaan. Yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang serupa dengan itu.

- f. Bersih dari tuduhan : tidak diterima seorang kesaksian yang dituduh karena percintaan atau permusuhan. ‘Umar ibnul Khaththab, Syuraih, ‘Umar bin Abdul Aziz, Al-‘Itrah, Abu Tsaur, dan Syafi’i di dalam salah satu dari kedua kaul-nya menentang hal itu. Mereka berkata: kesaksian orang tua atas anaknya dan kesaksian anak atas orang tuanya itu diterima, selagi masing-masing dari keduanya itu adil dan diterima kesaksiannya. Hal yang demikian juga ditunjukkan oleh Asy-Syaukani dan Ibnu Rusyd.<sup>60</sup>

### C. Istinbath

#### 1. Pengertian Istinbath

*Istinbath*” berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula- mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.<sup>61</sup> Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum-hukum *fiqh* dari *al-Qur’an* dan *al-Sunnah* melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul”. Dalam hal ini, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat *al-Qur’an* dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

---

<sup>60</sup>*Ibid*, h. 63

<sup>61</sup>Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hal.25.

Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Sedang sumber sekundernya adalah *ijtihad* para ulama. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syari'at islam harus berpijak atas *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu: *nash* dan *goiru al-nash*. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash*. Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thuruq al-lafzhiyah*). Pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti menggunakan *qiyas*, *Istihsan*, *istislah* (*mashalih al-mursalah*), dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum *syara'* yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli *fiqh* dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli *fiqh* menetapkan hukum *syariah* atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan

---

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 166.

sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli *ushul fiqh*.<sup>63</sup>

## 2. Syarat-Syarat Istinbath

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbath* adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat *al-Qur'an* yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *Ijma'*.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* tersusun dalam bahasa Arab, dll.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian untuk mendukung penelitian maka terdapat literatur yang akan dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (al- Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th), hal. 25.

Penelitian dari saudara Abdul Rohman berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan”.<sup>64</sup> Penulis menyimpulkan bahwa Ibnu Hazm membolehkan saksi perempuan dalam pernikahan dilandaskan pada hadis yang berbunyi “*Dua orang saksi perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki* “. Hadis tersebut berlaku mutlak dan tidak menunjukan adanya suatu batasan. Jadi, selain Ibnu Hazm membolehkan perempuan tanpa satu saksi laki-laki dalam pernikahan, dia juga membolehkan perempuan menjadi saksi dalam semua perkara meski tanpa disertai laki-laki.

Penelitian dari saudara Firman Adhari berjudul “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Bin Anas)”.<sup>65</sup> Penulis menyimpulkan bahwa menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang nikah tanpa wali dan saksi yakni Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang balik dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri. Menurut Imam Malik nikah tanpa adanya wali adalah pernikahan yang batil dan tidak sah. Menurut Imam Malik saksi saat akad nikah, tidak wajib tetapi cukup pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara lain.

---

<sup>64</sup> Abdul Rohman, “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan”, (Skripsi UIN Walisonggo Semarang, Semarang, 2017), h. 9

<sup>65</sup> Firman Adri, “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Bin Anas)”, (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2010), h. 8.



Imam Abu Hanifah berpendapat tentang saksi pernikahan, bahwasanya wanita boleh sebagai saksi dalam nikah. Namun kebolehan ini harus disyaratkan harus disertai dengan seorang laki-laki.

Penelitian dari saudari Asri Latifah berjudul “Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy Dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)”.<sup>66</sup> Dari hasil peneltian penulis menyimpulkan bahwa menurut as-Sarakhsiy saksi merupakan syarat sah nikah. Sedangkan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy menetapkan saksi sebagai syarat *kamal* atau *tamam* akad nikah dan termasuk sebagai syarat *nafaz* akad nikah.



---

<sup>66</sup> Asri Latifah, “*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy Dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)*”, (Skripsi UIN Walisonggo Semarang, Semarang, 2017), h. 11

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

----- *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

----- *Fiqh Cinta Kasih*, Jakarta: Erlangga, 2008

Al Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Fikih Empat Madzhab (Ijma'u Al Aimmah Al Arba'ah wa Ikhtilafihim)*, Terjemah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016) h. 260-263

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

----- *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Ahli Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

al-Zuhairy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr, 2002.

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994 .

Arief, Saifuddin, *Notaris Syariah Dalam Praktek Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam* Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: AMZAH, 2008.

----- *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Ghazali, Muhammad Bahri, Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2000.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm (Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqih)* Terjemah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2004

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Muktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Narbuko, Cholid Dkk, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Rahman Ghozali, Abdul, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Perdana Media Grup, 2003.

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Rasjid, Sulaiman, *FIQH ISLAM*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018

Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 2, Terjemah Semarang: ASY-SYIFA, 1990.

S. Munir, *fiqh syari'ah*, Solo: Amanda, 2007.

- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 14*, Bandung: Ma'arif Bandung, 1996.
- Salim, Bahreisy, dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Soenggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sudarsono, *Hukum keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Supriadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekata Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Teungku Muhammad Hasbi ASH Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 116
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Terjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

## JURNAL

- Abror, Khoirul, Wali dan Saksi Pernikahan (Perspektif Yuridis, Psikologis dan Sosiologi), *Jurnal Al-Adalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Ejen Abdul, Imam Sucipto, Endang Hamzah, Paradigma Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Status Saksi Nikah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.13 No. 2-2016

Moh. Makmur, dan Khoirul Rohman, Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang saksi dalam rujuk, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 April 2017.

Santoso, Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, *Jurnal hukum Islam dan hukum adat*, Yudisia, Vol.7 No.2 Desember 2016

Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2 -2016

## SKRIPSI

Asri Latifah, "*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya* (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsy Dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)", Skripsi UIN Walisonggo Semarang, Semarang, 2017

Firman Adri, "*Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi* (Studi Atas Metodologi Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Bin Anas)", Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2010

Abdul Rohman, "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan*", Skripsi UIN Walisonggo Semarang, Semarang, 2017

UU

Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar Dasar Perkawinan

Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974